

BAB V

SIMPULAN DAN SARAN

A. SIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis data dan pengujian hipotesis tentang pengaruh penerapan akuntansi keuangan daerah, pengawasan kualitas laporan keuangan instansi pemerintah, kejelasan sasaran anggaran dan sistem pelaporan, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Berdasarkan hasil uji statistik t, penerapan akuntansi keuangan daerah memiliki nilai signifikansi sebesar 0,341 (*Sig.* > 0,05), sehingga dapat disimpulkan bahwa penerapan akuntansi keuangan daerah tidak berpengaruh terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.
2. Berdasarkan hasil uji statistik t, pengawasan kualitas laporan keuangan instansi pemerintah memiliki nilai signifikansi sebesar 0,078 (*Sig.* > 0,05), sehingga dapat disimpulkan bahwa pengawasan kualitas laporan keuangan instansi pemerintah tidak berpengaruh terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.
3. Berdasarkan hasil uji statistik t, kejelasan sasaran anggaran memiliki nilai signifikansi sebesar 0,001 (*Sig.* < 0,05), sehingga dapat disimpulkan bahwa kejelasan sasaran anggaran berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.
4. Berdasarkan hasil uji statistik t, sistem pelaporan memiliki nilai signifikansi sebesar 0,000 (*Sig.* < 0,05), sehingga dapat disimpulkan bahwa

sistem pelaporan berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.

B. KETERBATASAN

Peneliti menyadari adanya keterbatasan yang mungkin mempengaruhi hasil penelitian ini, diantaranya:

1. Akuntabilitas kinerja instansi pemerintah pada penelitian ini hanya dilihat pengaruhnya dari empat variabel independen yaitu penerapan akuntansi keuangan daerah, pengawasan kualitas laporan keuangan instansi pemerintah, kejelasan sasaran anggaran dan sistem pelaporan.
2. Penelitian ini menggunakan data-data yang diberi ijin untuk mengukur akuntabilitas kinerja instansi pemerintah antara lain yaitu Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD), Badan Pendapatan Daerah (Bapenda), BAPPEDA, Dinas PU dan Tata Ruang, serta Bagian Administrasi Pembangunan, dari seluruh OPD yang ada di Kota Madiun.
3. Penelitian ini belum mengidentifikasi lama bekerja di posisi jabatan terakhir responden sehingga dapat berpengaruh pada pemahaman pada bidang penelitian yang terkait.

C. SARAN

Berdasarkan keterbatasan-keterbatasan di atas, peneliti selanjutnya disarankan untuk:

1. Penelitian selanjutnya hendaknya ditambahkan variabel penelitian lain yang mempengaruhi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah selain variabel penerapan akuntansi keuangan daerah, pengawasan kualitas laporan keuangan instansi pemerintah, kejelasan sasaran anggaran dan sistem pelaporan, antara lain yaitu pengendalian akuntansi, budaya organisasi, motivasi kerja, dan kesulitan sasaran anggaran.
2. Penelitian yang akan datang diharapkan untuk memperluas objek penelitiannya, misalnya tidak hanya pada OPD di Kota Madiun tetapi juga di Kabupaten Madiun, sehingga dapat memberikan gambaran yang lebih luas.
3. Penelitian yang akan datang diharapkan untuk memberikan kriteria berapa lama bekerja pada posisi jabatan terakhir.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, Hilmi. 2004. Pengaruh Kejelasan Sasaran Anggaran, Pengendalian Akuntansi dan Sistem Pelaporan Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Pada Kabupaten dan Kota di Daerah Istimewa Yogyakarta. *Tesis*. Program Pasca Sarjana UGM. Yogyakarta. *(tidak dipublikasikan)*
- Anjarwati, Mei. 2012. Pengaruh Kejelasan Sasaran Anggaran, Pengendalian Akuntansi dan Sistem Pelaporan Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. *Accounting Analysis Journal*. Volume 1, No. 2. 1-7.
- Bastian, Indra. 2010. *Akuntansi Sektor Publik: Suatu Pengantar*. Edisi 3. Yogyakarta: Penerbit Erlangga.
- Cahyani, Ni Made Mega dan Utama, I Made Karya. 2015. Pengaruh Kejelasan Sasaran Anggaran, Pengendalian Akuntansi dan Sistem Pelaporan pada Akuntabilitas Kinerja. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana* Volume 10, No. 3. 825-840.
- Darwanis dan Chairunnisa, Sephi. 2013. Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. *Jurnal Telaah dan Riset Akuntansi*. Volume 6, No. 2, Juli 2013: 150-174.
- Ghozali, Imam. 2005. *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program SPSS*. Semarang. Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Haiqal, Muhammad. 2009. Pengaruh Penerapan Akuntansi Keuangan Daerah dan Pengawasan Kualitas Laporan Keuangan Instansi Pemerintah Daerah Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Daerah (Studi Pada Kabupaten Aceh Jaya). *Skripsi*. Universitas Syiah Kuala. *(tidak dipublikasikan)*
- Herawaty, Netty. 2011. Pengaruh Kejelasan Sasaran Anggaran, Pengendalian Akuntansi dan Sistem Pelaporan Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Daerah Kota Jambi. *Jurnal Penelitian Universitas Jambi Seri Humaniora*. Volume 13, No. 2, Juli – Desember 2011 : 31-36.
- Khasanah, Dewi Nur. 2016. Pengaruh Kejelasan Sasaran Anggaran, Budaya Organisasi, Pengendalian Akuntansi, Sistem Pelaporan, dan Motivasi Kerja terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. *Skripsi*. Program Sarjana, Universitas Muhammadiyah Surakarta. *(tidak dipublikasikan)*
- Kusumaningrum, Indraswari. 2010. “Pengaruh Kejelasan Sasaran Anggaran, Pengendalian Akuntansi dan Sistem Pelaporan terhadap AKIP Provinsi Jateng”. *Tesis*. Program Pasca Sarjana: UNDIP. *(tidak dipublikasikan)*

- Lembaga Administrasi Negara. 2003. *Pedoman Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah*. Jakarta.
- Lembaga Administrasi Negara. 2011. *Pedoman Evaluasi AKIP*. Jakarta
- Mahmudi. 2007. *Manajemen Kinerja Sektor Publik*. Edisi 2. Yogyakarta: Unit Penerbit dan Percetakan Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen YKPN.
- Mardiasmo. 2006. *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: Andi Yogyakarta.
- Pemerintah Republik Indonesia. 2006. *Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah*.
- Pemerintah Republik Indonesia. 2010. *Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No. 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah*.
- Pemerintah Republik Indonesia. 2010. *Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan*.
- Santoso, Urip dan Pambelum, Yohanes Joni. 2008. Pengaruh Penerapan Akuntansi Sektor Publik terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dalam Mencegah Fraud. *Jurnal Administrasi Bisnis*. Volume 4, No 1. 14-33.
- Sujana, Edy., Primayogi, dan Adiputra. 2014. Pengaruh Kejelasan Sasaran Anggaran dan Efektivitas Pengendalian Internal terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. *e-Journal SI Ak Universitas Pendidikan Ganesha Jurusan Akuntansi Program SI*. Volume 2, No 1, 2014.
- Sujarweni, Wiratna V. 2015. *Akuntansi Sektor Publik Teori Konsep Aplikasi*. Yogyakarta: Penerbit Pustaka Baru Press.
- Yudianto, Ivan. 2005. Pengaruh Penerapan Akuntansi Sektor Publik, Pengawasan Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Instansi Pemerintah Terhadap Akuntabilitas Instansi Pemerintah dan Implikasinya Terhadap Pencegahan Fraud. *Tesis*. Program Pascasarjana, Universitas Padjajaran Bandung. (*tidak dipublikasikan*)
- Yulianti, Reni., Hardi, dan Rusli. 2014. Pengaruh Kejelasan Sasaran Anggaran, Kesulitan Sasaran Anggaran, Pengendalian Akuntansi, dan Sistem Pelaporan terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. *JOMFEKOM*. Volume 1, No. 2, Oktober 2014:1-15.